

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 97 TAHUN 2011
TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK (METODE TIGA ANGKA DASAR)

000 UMUM

000	UMUM
001	Lambang
.1	Garuda
.2	Bendera Kebangsaan
.3	Daerah
.31	Provinsi
.32	Kabupaten/Kota
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1
.1	Bintang
.2	Satya Lencana
.3	Parasamya Karya Nugraha
.4	Monumen
.5	Penghargaan Secara Adat
.6	Penghargaan Lainnya
003	Hari Raya/Besar
.1	Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dan sebagainya
.2	Hari Raya Keagamaan
.3	Hari Ulang Tahun
.4	Hari-hari Besar Internasional
004.	Ucapan
.1	Ucapan Terima Kasih
.2	Ucapan Selamat
.3	Ucapan Belasungkawa
.4	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
.1	Pamong Praja
.2	Tanda Pengenal
.3	Pejabat Lainnya
007	-
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor/termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas
012	Rumah Dinas
.1	Tanah Untuk Rumah Dinas
.2	Perabot Rumah Dinas
.3	Rumah Dinas Golongan I
.4	Rumah Dinas Golongan II
.5	Rumah Dinas Golongan III
.6	Rumah/Bangunan Lainnya
.7	Rumah Pejabat Negara
013	<i>Mess/Guest House</i>
014	RumahSusun / Apartemen
015	Penerangan Listrik/Jasa Listrik

- 016 Telepon/*Faximile*/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-umbul/Spanduk

020 PERALATAN

- .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
 - .1 Jasa non Fisik
 - .2 Jasa Fisik
 - .3 Konstruksi
 - .4 Non Konstruksi
 - .5 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- 028 Inventaris
- 029 -

030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 -
- 034 -
- 035 -
- 036 -

040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI

- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan Arsip
 - .31 Jadual Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .37 Daftar Pertelaan

- .4 Pembinaan Kearsipan
- .41 Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
- .51 -
- .6 Pengawetan
- 046 Sandi
- 047 -
- 048 -
- 049 -

050 PERENCANAAN

- .1 Repelita/8 Sukses (RPJM)
- .11 Pelita Daerah (RPJMD)
- .12 Bantuan Pembangunan Daerah
- .13 Bappeda
- 051 Proyek Bidang Pemerintahan Klasifikasikan di sini : Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh : Proyek Kepenjaraan : 051.86
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban tambahkan perincian 300 pada 053
Contoh : Proyek ketataprajaan: 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat tambahkan perincian 400 pada 054
Contoh: Proyek Resettlement Desa: 054.671
- 055 Bidang perekonomian tambahkan perincian 500 pada 055
Contoh: Proyek Pasar: 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum tambahkan perincian 600 pada 056
Contoh: Proyek Jembatan: 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

- .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah Struktur Organisasi
 - .1 Susunan dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Badan Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum
- 068 Komputerisasi/Siskomdagri
- 069 Analisis dan Formasi Jabatan
 - .1 Kompetensi Pegawai
 - .2 Uraian Jabatan
 - .3 Peningkatan Kinerja
 - .4 Budaya Kerja
 - .5 Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

070 PENELITIAN

- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi
- 075 Departemen
- 076 Non Departemen

- 077 Privinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa

080 KOFERENSI/RAPAT/SEMINAR

- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, eselon lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -

090 PERJALANAN DINAS

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 101 GDN (Gerakan Disiplin Nasional)
- 102 -
- 103 -
- 104 -

110 PEMERINTAHAN PUSAT

- 111 Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan
 - .1 Pertanggungjawaban Presiden Kepada MPR
 - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan
 - .1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden Kepada MPR
 - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 *Reshuffle*
 - .2 Penunjukan Menteri *ad interim*
 - .3 Sidang Kabinet
- 114 Departemen Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Departemen Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Pemerintahan Non Departemen

- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
119 Kerjasama Antar Departemen
120 PEMERINTAH PROVINSI
.04 Laporan Daerah
.042 Monografi Tambahkan kode wilayah
.1 Koordinasi
.2 Instansi Tingkat Provinsi
.21 Dinas Otonomi
.22 Instansi Vertikal
.23 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah
121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya.
122 Wakil Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya
123 Sekretaris Wilayah Daerah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
124 Badan- badan Pertimbangan Daerah, meliputi:
.1 Muspida
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasi lainnya
125 Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
.1 Pembinaan/ Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
.2 Pembentukan Wilayah Pembantu Gubernur, Wilayah Administratif, Bakorwil.
.3 Perubahan Batas Wilayah.
.4 Pemekaran Wilayah
126 Pembagian Wilayah
127 Penyerahan Urusan
128 Swapraja/ Penataan Wilayah/Daerah
129 -

130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
131 Bupati/ Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Meninggal, Memori Kepala Daerah, dan sebagainya.
.1 Sambutan/ Pengarahan/ Amanat
132 Wakil Bupati/ Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya.
133 Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, dan sebagainya
134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1 Muspida
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasi lainnya
.4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
135 Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
.1 -
.2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
.3 -
.4 Perubahan Batas Wilayah
.5 Pemekaran Wilayah
.6 Permasalahan Batas Wilayah

- .7 Pembentukan Ibukota/Kotamadya
- .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambuatan/Pengarahan/Amanat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
 - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
 - .6 -
 - .7 -
- 139 -

140 PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

- 141 Pamong Desa, meliputi : pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
 - .5 Kerjasama antar Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa, Jangan Klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan
 - .2 Sekretaris Kelurahan
 - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Rukun Kampung

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD

- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
- 156 Persidangan Sidang Pleno Dengar-Pendapat Rapat Komisi Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak

160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH

161	
.1	Keanggotaan
.2	Pencalonan
.3	Pengangkatan
.4	Pemberhentian
.5	Recall
.6	Meninggal
.7	Pelanggaran
162	Persidangan
.1	Reses
163	Kesejahteraan
.1	Keuangan
.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	-
167	-
168	-
169	-

170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH

171	Keanggotaan
.1	Pencalonan
.2	Pengangkatan
.3	Pemberhentian
.4	Recall
.5	Meninggal
172	Persidangan
173	Kesejahteraan
.1	Keuangan
.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176	-
177	-
178	-
179	-

180 HUKUM

.1	Konstitusi
.11	Dasar Negara
.12	Undang-Undang Dasar
.2	Garis Besar Haluan Negara
181	Pendata
.1	Tanah
.2	Rumah
.3	Utang/Piutang
.31	Gadai
.32	Hipotik
.4	Notariat
182	Pidana
.1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183	Peradilan
	Peradilan Agama Islam, lihat 451.6
	Peradilan Perkara Tanah, lihat 593.71
.1	Bantuan Hukum
184.31	Hukum Internasional

185	Imigrasi
.1	<i>Visa</i>
.2	<i>Pasport</i>
.3	<i>Exit</i>
.4	<i>Reentry</i>
.5	Lintas Batas
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
.1	TAP MPR
.2	Undang-Undang
.3	Peraturan
.31	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
.32	Peraturan Menteri
.33	Peraturan Lembaga Non Departemen
.34	Peraturan Daerah
.341	Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur
.342	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota
.4	Keputusan
.41	Presiden
.42	Menteri
.43	Lembaga Pemerintah Non Departemen
.44	Gubernur
.45	Bupati/Walikota
.5	Instruksi
.51	Presiden
.52	Menteri
.53	Lembaga Pemerintah Non Departemen
.54	Gubernur
.55	Bupati/Walikota
189	Hukum Adat
.1	Tokoh Adat/Masyarakat

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
.1	ASEAN
.2	Bantuan Luar Negeri
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-

200 POLITIK

200 POLITIK

201	Kebijkasanaan Umum
202	Orde Baru
203	Reformasi
204	-
205	-
206	-

210 KEPARTAIAN

211	Lambang Partai
-----	----------------

212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantuan Keuangan Parpol
214	Komposisi Kepengurusan
215	Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
.1	Bendahara Partai
216	Tempat / Kedudukan / Alamat
217	-
218	-
219	-

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

221	Berdasarkan Perjuangan
.1	Perintis Kemerdekaan
.2	Angkatan '45
.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaannya
.1	PEPABRI
.2	WREDA TAMA
223	Berdasarkan Kerohanian / Agama
224	Lembaga Adat
225	Penghayatan Kepercayaan
226	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Yayasan
.1	Pemerhati Lingkungan Hidup / Kesehatan
.2	Pemerhati Pendidikan
.3	Pemerhati Sosial
.4	Pemerhati HAM / Demokrasi / Hukum
.5	Pemerhati Amal
.6	Pemerhati Pemerintahan
.7	Pemerhati Bencana Alam
.8	Pemerhati Kerukunan Hidup
.9	Pemerhati Tenaga Kerja
227	-
228	-
229	-

230 ORGANISASI PROFESI

231	Ikatan Profesi Kesehatan
.1	IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
.2	PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)
.3	PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
.4	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
.5	Persatuan Ahli Gizi Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
.1	Ikatan Notaris Indonesia
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia

240 ORGANISASI PEMUDA

241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor

245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	-
248	-
249	-

250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKATAN

251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Profesional Seluruh Indonesia (SPSI)
256	Gabungan Pengusaha Ojek Seluruh Indonesia (GAPOKSI)
257	-
258	-
259	-

260 ORGANISASI WANITA

261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-

270 PEMILIHAN UMUM

271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
273	Kampanye/Dana
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/ Daftar Pemilih
276	Sarana Logistik
.1	TPS
.2	Surat Suara
.3	Kotak Suara
.4	Tinta / Alat Tulis
277	Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
278	Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD, DPD
279	Sarana Penyelenggara Pemilu
.1	Kantor
.2	Kendaraan

280 PELANGGARAN PEMILU

.1	di TPS
.2	di PPK
.3	Kampanye
281	-
282	-
283	-
284	-
285	-
286	-
287	-
288	-

289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -

300 KEAMANAN/ KETERTIBAN

300 KEAMANAN/ KETERTIBAN
301 Ketentraman dan Ketertiban Umum
302 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
303 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -

310 PERTAHANAN

311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 Perbatasan
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -

320 KEMILITERAN

321 Latihan Militer
322 Wajib Militer
323 Operasi Militer
324 Kekayaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
.1 AMD
.2 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -

330 KEAMANAN

331 Kepolisian

.1	Polisi Pamong Praja
.2	Kamra
.3	Kamling
.4	Jaga Wana
332	Huru-hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Pejudian
336	Surat-surat Kaleng
337	Pengaduan
338	Himbauan/Larangan
339	-

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

341	Latihan Dasar
342	Bencana
.1	Pengurangan Resiko
.2	Laporan
.3	Bantuan
.4	Peralatan Penanggulangan
.5	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
343	-
344	-
345	-
346	-
347	-
348	-
349	-

350 KEJAHATAN

351	Makar/Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, Pencurian / Perampasan
354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya

360 BENCANA

361	Gempa Bumi
362	Banjir
363	Angin Topan
364	Kebakaran
.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	Gunung Api
368	Gerakan Tanah / Tanah Longsor
369	-

370 KECELAKAAN (Klasifikasi di sini : SAR)

371	Darat
372	Udara
373	Laut

374 Sungai/Danau
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -

380 -

381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -

390 -

391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

401 Keluarga Miskin
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -

410 PEMBANGUNAN DESA

411 Pembinaan Usaha Gotong-royong
.1 Swadaya Gotong-royong
.11 Penataan Gotong-royong
.12 Gotong-royong Dinamis
.13 Gotong-royong Statis
.14 Pungutan
.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
.21 Pembinaan
.22 Klasifikasi
.23 Proyek
.24 Musyawarah
.3 Latihan Kerja Masyarakat
.31 Kader Masyarakat
.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
.33 Pusat Latihan
.34 Kursus – kursus

.35	Kurikulum/Sylabus
.36	Keterampilan
.37	Pramuka
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
.41	Program
.42	Pembinaan Organisasi
.43	Kegiatan
.5	Penyuluhan
.51	Publikasi
.52	Peragaan
.53	Sosio Darma
.54	Siaran Pedesaan
.55	Penyuluhan Lapangan
.6	Kelembagaan Desa
.61	Kelompok Tani
.62	Rukun Tani
.63	Subak
.64	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa
.1	Produksi Desa
.11	Pengolahan
.12	Pemasaran
.2	Keuangan Desa
.21	Perkreditan Desa
.22	Inventarisasi Data
.23	Perkembangan/Pelaksanaan
.24	Bantuan/Stimulans
.25	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
.3	Koperasi Desa
.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.32	Koperasi Usaha Desa (KUD)
.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.41	Jumlah Desa yang diberi bantuan
.42	Pengarahan
.43	Pusat
.44	Daerah
.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.51	Pusat
.52	Daerah
.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
.61	Bantuan Langsung
.62	Bantuan Keserasian
.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Prasarana Desa
.1	Prasarana Desa
.11	Pembinaan
.12	Bimbingan Teknis
.2	Pemukiman kembali penduduk
.21	Lokasi
.22	Diskusi
.23	Pelaksanaan
.3	Masyarakat Pradesa
.31	Pembinaan
.32	Penyuluhan
.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
.41	Rumah Sehat
.42	Proyek Perintis
.43	Pelaksanaan
.44	Pengembangan
.45	Perbaikan Kampung

- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus (K)
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -

- 420 **PENDIDIKAN****
 - .1 Pendidikan Khusus. Klasifikasi di sini: Pendidikan Putra-putri Irian Jaya
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar
 - .71 Reuni, Dharmawisata
 - .72 Pelajar Teladan
 - .73 Resimen Mahasiswa (MENWA)
 - .74 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, MOS, Ospek
 - .2 Tujuan Belajar

- .3 Hari Libur
- .4 Uang Sekolah, Klasifikasi di sini SPP
- .5 Bea Siswa
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor,
Klasifikasi di sini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olahraga
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi di sini: PON, Porsade, Olimpiade, dan sebagainya
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan, meliputi: Organisasi dan Kegiatan Remaja
Klasifikasi di sini: Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan untuk Departemen Dalam Negeri, lihat 890

- 430 KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi, termasuk Pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 Cagar Budaya
- 438 Nilai Budaya
- 439 Perfilman

- 440 KESEHATAN**
- 441. Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gigi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker

- .5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- .6 Perawatan
- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442. Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
 - .3 Pengiriman / Pendistribusian
- 443. Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
 - .3 Epidemiologi & Karantina (Epidka)
 - .31 Kholera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveilense
 - .34 Rabies (anjing gila)
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah) (DHF)
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .5 Hygiene Sanitasi
 - .51 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
- 444. Gizi
 - .1 Kekurangan makanan, bahaya kelaparan, busung lapar
 - .2 Keracunan makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPG)
 - .5 Progam Makanan Tambahan Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Poliklinik
- 446 Tenaga Medis
- 447 Alat Medis
- 448. Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun
- 449. -

- 450. **AGAMA**
- 451. Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat, Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi

.42	Menengah
.43	Dasar
.44	Pondok Pesantren
.45	Gedung Sekolah
.46	Tenaga Pengajar
.47	Buku
.48	Dakwah
.49	Organisasi/Lembaga Pendidikan
.5	Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dan sebagainya
.6	Peradilan
.7	Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
.8	Mazhab
452	Protestan
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadah
.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
.4	Mazhab
.5	Organisasi Gerejani bukan politik
453	Katholik
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadah
.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor.
.4	Mazhab
.5	Organisasi Gerejani bukan politik
454	Hindu
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadah
.3	Tokoh agama
.4	Mazhab
.5	Organisasi Keagamaan bukan politik
455	Budha
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadah
.3	Tokoh agama, Rohaniawan
.4	Mazhab
.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
456	Urusan Haji
.1	ONH
.2	Manasik
457	-
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
.1	Cacat Mata
.2	Cacat Tubuh
.3	Cacat Mental
.4	Bisu/tuli
462	Tuna Sosial
.1	Gelandangan
.2	Pengemis
.3	Tuna Susila
.4	Anak Nakal
463	Kesejahteraan Anak/Keluarga
.1	Anak Putus Sekolah
.2	Ibu Teladan
.3	Anak Asuh
464	Pembinaan Pahlawan

- .1 Pahlawan, meliputi: Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.
- .2 Perintis Kemerdekaan, meliputi: Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan dan Jandanya.
- .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 467 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 pencarian dana untuk sumbangan
 - .3 penyelenggarakan undian ketangkasan, bazar dan sebagainya
 - .4 Panti asuhan
 - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing, meliputi: Bimbingan Pendidikan, Kesehatan Pemukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN**
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
 - .24 Daerah terbelakang
 - .25 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing tinggal sementara
 - .33 Orang Asing tinggal tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk antar Negara di Wilayah perbatasan antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
 - .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusakan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kematian dan Kelahiran
 - .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam

.25	Advokasi Perkawinan dan Perceraian
.3	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi
.31	Pengangkatan Anak
.32	Pengakuan Anak
.33	Pengesahan Anak
.34	Perubahan Akta
.35	Pembatalan Akta
.36	Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta
.4	Pencatatan Kewarganegaraan
.41	Akibat Perkawinan
.42	Akibat Kelahiran
.43	Non Perkawinan
.44	Non Kelahiran
.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
.1	Teknologi Informasi
.11	Perangkat Keras
.12	Prangkat Lunak
.13	Jaringan Komunikasi Data
.2	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
.21	Daerah Maju
.22	Daerah Berkembang
.23	Daerah Terbelakang
.3	Pengolahan Data Kependudukan
.31	Pendaftaran Penduduk
.32	Kejadian Vital Penduduk
.33	Penduduk Non Registrasi
.4	Pelayanan Informasi Kependudukan
.41	Media Elektronik
.42	Media Cetak
.43	<i>Outlet</i>
474	Perkembangan Penduduk
.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
.11	Struktur Jumlah
.12	Komposisi
.13	Fertilitas
.14	Kesehatan Reproduksi
.15	Morbiditas Penduduk
.16	Mortalitas Penduduk
.2	Pengembangan Kualitas Penduduk
.21	Anak dan Remaja
.22	Penduduk Usia Produktif
.23	Penduduk Usia Lanjut
.24	<i>Gender</i>
.3	Penataan Persebaran Penduduk
.31	Migrasi antar Wilayah
.32	Migrasi International
.33	Urbanisasi
.34	Sementara
.35	Migarsi Non Permanen
.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
.41	Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
.44	Partisipasi Masyarakat
.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
.51	Pendidikan Jalur Sekolah
.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah

.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475	Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
.1	Indikator Kependudukan
.11	Perumusan Penempatan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan
.2	Proyeksi Penduduk
.21	Penyusun dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
.22	Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
.3	Analisis Dampak Kependudukan
.31	Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan
.32	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
.41	Lembaga International
.42	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
.43	Lembaga Usaha Swasta
.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
.51	Lembaga Pemerintah
.52	Pemerintah Provinsi
.53	Pemerintah Kabupaten/Kota
.6	Analisis
476	Monitoring
477	Evaluasi
478	Dokumentasi
479	-
480	MEDIA MASSA
481	Penerbitan
.1	Surat Kabar
.2	Majalah
.3	Buku
.4	Penerjemahan
482	Radio
.1	RRI
.11	Siaran Pedesaan, jangan diklasifikasikan di sini. Lihat : 411.54
.2	Non RRI
.3	Luar Negeri
483	Televisi
484	Film
485	Pers
.1	Kewartawanan
.11	Wawancara
.12	Informasi Nasional
486	Grafika
487	Penerangan
.1	Pameran Non Komersial
488	Operation Room
489	Hubungan Masyarakat
490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-

497 -
498 -
499 -

500 PEREKONOMIAN

500 PEREKONOMIAN

.1 Dewan Stabilisasi
501 Pengadaan Pangan
502 Pengadaan Sandang
503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan suatu bidang, klasifikasikan pada masalahnya.
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini : Tataniaga
.1 Promosi Perdagangan
.11 Pekan Raya
.12 Iklan
.13 Pameran, Pameran non komersial Lihat 487.1
.2 Pelelangan
.3 Tera
511 Pemasaran
.1 Sembilan bahan pokok, Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun, dan Sebagainya.
.2 Pasar
.3 Pertokoan, kaki lima, kios
512 Ekspor
513 Impor
514 Perdagangan antar pulau
515 Perdagangan Luar Negeri
516 Perundangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
517 Aneka Usaha Perdagangan
518 Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM)
.1 Kelembagaan
.11 Pendirian Badan Hukum Koperasi
.12 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
.13 Amalgamasi / Pembubaran Koperasi
.14 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
.15 Peningkatan Kelembagaan Koperasi
.16 Penetapan Peningkatan Koperasi
.2 Usaha Koperasi
.21 Usaha Koperasi Pertanian
.22 Usaha Koperasi Kehutanan
.23 Usaha Koperasi Perkebunan
.24 Usaha Koperasi Perikanan
.25 Usaha Koperasi Peternakan
.26 Usaha Koperasi Perdagangan
.27 Usaha Koperasi Perindustrian
.28 Usaha Koperasi Pertambangan
.3 Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam
.31 Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (USP)
.32 Pembiayaan Pola Konvensional

.33	Pembiayaan Pola Syariah
.34	Rekomendasi dan Dana Bergulir
.35	Penagihan Dana Bergulir
.36	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
.37	Sertifikasi Tanah bagi PMK
.38	Kasus KSP / USP / Koperasi
.4	Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)
.41	Kerjasama UMKM
.42	Informasi Bisnis
.43	Pemasaran Usaha
.44	Pemberdayaan UMKM
.45	Perlindungan dan Iklim Usaha
.46	Kemitraan dan Jaringan Usaha
.47	Sosialisasi UMKM
.48	Klinik UMKM
.5	UPT Diklat Koperasi dan UMKM
.51	Diklat Perkoperasian untuk Gerakan Koperasi
.52	Diklat UMKM
519	-

520

PERTANIAN

521	Tanaman Pangan
.1	Program
.11	Bimas/Inmas termasuk kredit
.12	-
.2	Produksi
.21	Padi/Panen
.22	Palawija
.23	Jagung
.24	Ketela Pohon/Ubi-ubian
.25	Hortikultura
.26	Sayuran/Buah-buahan
.27	Tanaman Hias
.28	Pembudidayaan Rumput Laut
.3	Saran usaha pertanian
.31	Peralatan, meliputi traktor dan sebagainya
.32	Pembibitan
.33	Pupuk
.34	Sertifikasi Benih
.4	Perlindungan tanaman
.41	Penyakit, Penyakit Dalam, Penyakit Batang
.42	Hama Serangga : Wereng, Walang Sangit, Tungro, Hama Tikus dan sejenisnya
.43	Pemberantasan Hama, meliputi : Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan Melalui Udara
.44	Pestisida
.5	Tanah Pertanian Pangan
.51	Persawahan
.52	Perladangan
.53	Kebun
.54	Rumpon Ikan Laut
.55	KTA/Lahan Kritis
.6	Pengusaha Pertanian
.7	Bina Usaha
.71	Pasca Panen
.72	Pemasaran Hasil
522	Kehutanan
.1	Program
.11	Hak pengusaha hutan

.12	Tata guna Tanah
.13	Perpetaan Hutan
.14	Tumpangsari
.2	Produksi
.21	Kayu
.22	Non Kayu
.3	Sarana usaha kehutanan
.4	Penghijauan
.5	Kelestarian
.51	Cagar alam, margasatwa, suaka margasatwa
.52	Berburu, meliputi larangan dan ijin berburu
.53	Kebun Binatang
.54	Konservasi Lahan
.6	Penyakit/Hama
.7	Jenis-jenis Hutan
.71	Hutan Hidup
.72	Hutan Wisata
.73	Hutan Produksi
.74	Hutan Lindung
523	Perikanan
.1	Program
.11	Penyuluh
.12	Teknologi
.2	Produksi
.21	Pelelangan
.3	Usaha Perikanan
.31	Pembibitan
.32	Daerah Penangkapan
.33	Pertambakan, meliputi: Tambak Ikan Deras, Tambak Udang, dan lain-lain
.34	Jaring Apung
.4	Sarana
.41	Peralatan
.42	Kapal
.43	Pelabuhan
.5	Pengusaha, Nelayan
524	Peternakan
.1	Produksi
.11	Susu ternak rakyat
.12	Telur
.13	Daging
.14	Kulit
.2	Sarana usaha ternak
.21	Pembibitan
.22	Kandang Ternak
.3	Kesehatan hewan
.31	Penyakit Hewan
.32	Pos Kesehatan Hewan
.33	<i>Tesi Pullorum</i>
.34	Karantina
.35	Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya
.4	Perunggasan
.5	Pengembangan Ternak
.51	Inseminasi Buatan
.52	Pembibitan/Bibit Unggul
.53	Penyebaran Ternak
.6	Makanan Ternak
.7	Tempat pemotongan hewan
.8	Data Peternakan
525.	Perkebunan

.1	Program
.2	Produksi
.21	Karet
.22	Teh
.23	Tembakau
.24	Tebu
.25	Cengkeh
.26	Kopra
.27	Kopi
.28	Coklat
.29	Aneka tanaman
.3	Sarana Prasarana Perkebunan
.31	Sarana Prasarana Produksi
.4	Proteksi Tanaman Perkebunan
.41	Konversi
.42	Pengendalian OPT
.43	Gangguan Usaha
.5	Usaha Tani Perkebunan
.51	Bimbingan Usaha dan Prasarana
.52	Pengolahan Hasil
.53	Kelembagaan
6.	Pembenihan
526	-
527	-
528	-
529	-

530	PERINDUSTRIAN
.08	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/Elektronik
533	Industri Kimia/farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri makanan/minuman
536	Aneka Industri/Perusahaan
537	Aneka kerajinan
538	Usaha Negara/BUMN
.1	Perjan
.2	Perum
.3	Persero/PT, CV
539	Perusahaan Daerah/BUMD

540	PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN
541	Minyak Bumi
.1	Eksplorasi
.2	Eksplorasi
542	Gas Bumi
.1	Eksplorasi/Pengeboran
.11	Kontrak Kerja
.2	Pengolahan Tangki, Pompa, Tanker
543	Pertambangan Umum
.1	Logam
.2	Non Logam
.3	Radioaktif
.4	Batu bara
544	Panas Bumi
545	Aneka Tambang
546	Geologi

.1	Vulkanologi
.11	Pengawasan gunung berapi
.2	Sumur artesis, Air Bawah Tanah
547	Laboratorium Sumber Daya Manusia (SDM)
.1	Jasa Analisa
.2	Jasa Teknik Pertambangan
548	Kesamuderaan
549	Pesisir Pantai
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, dan Danau
.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
.2	Angkutan Jalan Raya
.21	Perizinan
.22	Terminal
.23	Alat angkutan
.24	Pengujian Kendaraan Bermotor
.25	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
.26	Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor
.27	Rekomendasi
.3	Angkutan Sungai
.31	Perizinan
.32	Terminal
.33	Pelabuhan
.4	Angkutan Danau
.41	Perizinan
.42	Terminal
.43	Pelabuhan
.5	<i>Feri</i>
.51	Perizinan
.52	Terminal
.53	Pelabuhan
.6	Perkerata apian
552	Perhubungan Laut
.1	Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
.11	Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
.12	Pelayaran Dalam Negeri
.13	Pelayaran Luar Negeri
.2	Perkapalan Alat Angkutan
.3	Pelabuhan
.4	Pengerukan
.5	Penjagaan pantai
553	Perhubungan Udara
.1	Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
.2	Pelabuhan Udara / Bandara
.3	Alat Angkutan
554	Pos
555	Telekomunikasi
.1	Telepon
.2	Telegram
.3	<i>Telex/SSB</i>
.4	Satelit
.5	Stasiun Bumi
556	Pariwisata
.1	Obyek Daya Tarik Wisata
.2	Sarana Pariwisata
.3	Jasa Pariwisata
.4	Pemasaran
.5	Sumber Daya Pariwisata dan Peran serta masyarakat

557.	Meteorologi
.1	Ramalan Cuaca
.2	Curah Hujan
.3	Kemarau
558	-
559	-

560 TENAGA KERJA

.1	Pengangguran
561	Upah
562	Penempatan tenaga kerja, TKI
563	Latihan kerja
564	Tenaga sukarela
.1	Butsi
.2	Padat karya
565	Perselisihan perburuhan
566	Keselamatan kerja
567	Pemutusan hubungan kerja
568	Kesejahteraan buruh
569	Tenaga orang asing

570 PERMODALAN

571	Modal domestik
572	Modal asing
573	Modal patungan (<i>joint venture</i>) penyertaan modal
574	Pasar uang dan modal
575	Saham
576	-
577	-
578	-
579	-

580 PERBANKAN/MONETER

581	Kredit
582	Investasi
583	Deposito
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
586	Alat pembayaran, cek, giro, wesel, transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara
589	Moneter

590 AGRARIA

591.	Tata guna tanah
.1	Pemetaan dan pengukuran
.2	Perpetaan
.3	Penyediaan data
.4	Fatwa tata guna tanah
.5	Tanah kritis
592	<i>Landreform</i>
.1	Redistribusi
.11	Pendaftaran pemilikan dan pengurusan
.12	Penentuan tanah obyek <i>landreform</i>
.13	Pembagian tanah obyek <i>landreform</i>
.14	Sengketa redistribusi tanah obyek <i>landreform</i>
.2	Ganti rugi
.21	Ganti rugi tanah kelebihan meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan

- .22 Ganti rugi tanah absentee
meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- .23 Ganti rugi tanah partikelir
meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- .3 Bagi hasil
- .31 Penetapan imbalan bagi hasil
- .32 Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
- .33 Sengketa perjanjian bagi hasil
- .4 Gadai tanah
- .41 Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
- .42 Pelaksanaan gadai tanah
- .43 Sengketa gadai tanah
- .5 Bimbingan dan penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan dana *landreform* (YDL)
- 593 Pengurusan hak-hak tanah
- .01 Penyusunan program bimbingan teknis
- .1 Sewa tanah
- .11 Sewa tanah untuk tanaman tertentu, tebu, tembakau, rosela,
corchorus
- .2 Hak milik
- .21 Perorangan
- .22 Badan hukum
- .3 Hak pakai
- .31 Perorangan
- .311 Warga Negara Indonesia
- .312 Warga Negara Asing
- .32 Badan hukum
- .321 Badan Hukum Indonesia
- .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, kantor dagang
asing.
- .33 Tanah gedung-gedung negeri
- .4 Guna usaha
- .41 Perkebunan besar
- .42 Perkebunan rakyat
- .43 Peternakan
- .44 Perikanan
- .45 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
- .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
- .54 Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 565
- .55 Pemulihan Hak (Pen, Pres, 4/1960)
- .6 Hak pengelolaan
- .61 PN Perumnas, *Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate*
- .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa tanah
- .71 Peradilan perkara tanah (lihat juga 183)
- .8 Pencabutan dan pembebasan tanah
- .81 Pencabutan hak
- .82 Pembebasan tanah
- .83 Ganti rugi tanah
- 594. Pendaftaran tanah
- .1 Pengukuran/pemetaan
- .11 Fotogrametri
- .12 Terrestrial
- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
- .2 Dana pengukuran (Permen Agraria No.61/1965)

.3	Sertifikat
.4	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
595.	Lahan Transmigrasi
.1	Tata guna tanah
.2	Landreform
.3	Pengurusan hak-hak tanah
.4	Pendaftaran tanah
596	-
597	-
598	-
599	-

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata bangunan konstruksi dan Industri konstruksi.
602	Kontraktor, pemborong
.1	Tender
.2	Penunjukan
.3	Prakualifikasi
.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
.32	Tanda Daftar Rekanan (TDR)
603	Arsitektur
604	Bahan bangunan
.1	Tanah dan batu, seperti : batu belah, <i>steen slaag</i> , split dan sebagainya
.2	Aspal, aspal buatan, aspal alam (Butas)
.3	Besi dan logam lainnya
.31	Besi beton
.32	Besi profil (konstruksi)
.33	Paku
.34	Aluminium profil
.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, <i>Tech</i> , <i>Til</i> , pengawet kayu)
.5	Semen
.6	Kayu (seperti : Balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb.)
.7	Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang)
.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
.9	Bahan-bahan bangunan lainnya.
605	Instalasi
.1	Instalasi bangunan
.2	Instalasi air
.3	Instalasi sanitasi
.4	Instalasi pengaturan udara
.5	Instalasi akustik
.6	Instalasi cahaya/penerangan
606	Konstruksi pencegahan
.1	Konstruksi Pencegahan terhadap kebakaran
.2	Konstruksi Pencegahan terhadap gempa
.3	Konstruksi Pencegahan terhadap angin/udara/panas
.4	Konstruksi Pencegahan terhadap kekaduahan
.5	Konstruksi Pencegahan terhadap gas/explosife
.6	Konstruksi Pencegahan terhadap serangga
.7	Konstruksi Pencegahan terhadap radiasi atom
607	-
608	-
609	-

610	PENGAIRAN
611.	Irigasi
.1	Bangunan waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan banjir
.14	Menara pengambilan
.2	Bangunan pengambilan
.21	Bendung
.22	Bendung dengan pintu bilas
.23	Bendung dengan pompa
.24	Pengambilan bebas
.25	Pengambilan bebas dengan pompa
.26	Sumur dengan pompa
.27	Kantung lumpur
.28	<i>Silt ekstraktor</i>
.29	<i>Escope channel</i>
.3	Bangunan pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran induk
.312	Saluran sekunder
.313	Suplesi
.314	Tersier
.315	Saluran kwarter
.316	Saluran pasangan
.317	Saluran tertutup/terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan bagi
.322	Bangunan bagi dan sadap
.323	Bangunan sadap
.324	Bangunan <i>check</i>
.325	Bangunan terjun
.33	<i>Box tersier</i>
.34	Got miring
.35	Talang
.36	<i>Syphon</i>
.37	Gorong-gorong
.38	Pelimpahan samping
.4	Bangunan pembuang
.41	Saluran
.411	Saluran pembuang induk
.412	Saluran pembuang sekunder
.413	Saluran pembuang tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan outlet
.422	Bangunan terjun
.423	Bangunan penahan banjir
.43	Gorong-gorong pembuang
.44	Talang pembuang
.45	Syphon pembuang
.5	Bangunan lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan inspeksi
.512	Jalan logistik
.52	Jembatan
.521	Jembatan inspeksi
.522	Jembatan hewan
.53	Tangga cuci
.54	Kubangan kerbau

.55	Waduk lapangan
.56	Bangunan penunjang
.57	Jaringan telepon
.58	Stasiun agro
612	<i>Folder</i>
.1	Tanggul Keliling
.11	Tanggul
.12	Bangunan penutup sungai
.13	Jembatan
.2	Bangunan pembawa
.21	Saluran
.211	Saluran muka induk
.213	Saluran pembawa sekunder
.22	Stasiun pompa pemasukan
.23	Bangunan bagi
.24	Gorong-gorong
.25	<i>Syphon</i>
.3	Bangunan pembuang
.31	Stasiun pompa pembuang
.32	Saluran
.321	Saluran pembuangan induk
.322	Saluran pembuangan sekunder
.33	Pintu air pembuangan
.34	Gorong-gorong pembuangan
.35	<i>Syphon</i> pembuangan
.4	Bangunan lainnya
.41	Bangunan
.411	Bangunan pengukur air
.412	Bangunan pengukur curah hujan
.413	Bangunan gudang stasiun pompa
.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
.42	Rumah petugas eksploitasi
613	Pasang surut
.1	Bangunan Pembawa
.11	Saluran
.111	Saluran Pembawa Induk
.112	Saluran Pembawa Sekunder
.113	Saluran Pembawa Tersier
.114	Saluran Penyimpanan Air
.12	Bangunan Pintu Pemasukan
.2	Bangunan pembuang
.21	Saluran
.211	Saluran pembuang induk
.212	Saluran pembuang sekunder
.213	Saluran pembuang tersier
.214	Saluran pengumpul air
.22	Bangunan pintu pembuangan
.3	Bangunan lainnya
.31	Kolam pasang
.32	Saluran
.321	Saluran lalu lintas
.322	Bangunan pengukur muka air
.33	Bangunan
.331	Bangunan Penangkis Kotoran
.332	Bangunan Pengukur Muka Air
.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
.34	Jalan
.35	Jembatan
614	Pengendalian sungai
.1	Bangunan pengaman

.11	Tanggul banjir
.12	Pintu pengatur banjir
.13	Klep pengatur banjir
.14	Tembok pengaman talud
.15	Krib
.16	Kantung lumpur
.17	<i>Check-dam</i>
.18	<i>syphon</i>
.2	Saluran pengaman
.21	Saluran banjir
.22	Saluran <i>drainage</i>
.23	<i>Corepure</i>
.3	Bangunan lainnya
.31	<i>Warning system</i>
.32	Stasiun
.321	Stasiun pengukur curah hujan
.322	Stasiun pengukur air
.323	Stasiun pengukur cuaca
.324	Stasiun pos penjagaan
615	Pengaman pantai
.1	Tanggul
.2	Krib
.3	Bangunan lainnya
616	Air Tanah
.1	Stasiun pompa
.2	Bangunan pembawa
.3	Bangunan pembuang
.4	Bangunan lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan sementara
.21	Jalan sementara
.22	Jembatan sementara
.23	Kantor proyek
.24	Gudang proyek
.25	Barak kerja
.26	Laboratorium lapangan
.27	Rumah
.3	Badan jalan
.31	Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis pondasi bawah
.42	Lapis pondasi
.43	Lapis permukaan
.5	<i>Drainage</i>
.51	Parit tanah
.52	Gorong-gorong (<i>culvert</i>)
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan

.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
.92	Lampu penerangan
.93	Lampu pengatur lalu lintas
.94	Patok-patok KM
.95	Patok-patok ROW (sempadan)
.96	Rel pengaman
.97	Pagar
.98	Turap penahan
.99	Bronjong
622	Jalan luar kota
.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan sementara
.21	Jalan sementara
.22	Jembatan sementara
.23	Kantor proyek
.24	Gudang proyek
.25	Barak kerja
.26	Laboratorium lapangan
.27	Rumah
.3	Badan jalan
.31	Pekerjaan tanah (earth work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan (<i>pavement</i>)
.41	Lapis pondasi bawah
.42	Lapis pondasi
.43	Lapis permukaan
.5	<i>Drainage</i>
.51	Parit
.52	Gorong-gorong (<i>Culvert</i>)
.53	Sub <i>Drainage</i>
.6	Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
.92	Lampu penerangan
.93	Lampu pengatur lalu lintas
.94	Patok-patok KM
.95	Patok-patok ROW (Sempadan)

.96	Rel-rel pengaman
.97	Pagar
.98	Turap pengaman
.99	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota
.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan sementara
.21	Jalan sementara
.22	Jembatan sementara
.23	Kantor proyek
.24	Gudang proyek
.25	Barak kerja
.26	Laboratorium lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>)
.31	Galian tanah
.32	Timbunan tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi kepala jembatan
.42	Pondasi pilar
.43	Pondasi angker
.5	Bangunan bawah
.51	Kepala jembatan
.52	Pilar
.53	<i>Piloon</i>
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan orang/trotoir
.65	Sandaran
.66	Talang air
.7	Bangunan pengaman
.71	Turap/penahan
.72	Bronjong
.73	Strek dam
.74	Kist dam
.75	<i>Courpure</i>
.76	Krib
.8	Bangunan pelengkap
.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
.82	Lampu penerangan
.83	Lampu pengatur lalu lintas
.84	Patok pengaman
.85	Patok ROW (sempadan)
.86	Pagar

.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	<i>Drainage</i>
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan pada jalan luar kota
.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan sementara
.21	Jalan sementara
.22	Jembatan sementara
.23	Kantor proyek
.24	Gudang proyek
.25	Barak kerja
.26	Laboratorium lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan tanah
.31	Galian tanah
.32	Timbunan tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi kepala jembatan
.42	Pondasi pilar
.43	Pondasi angker
.5	Bangunan bawah
.51	Kepala jembatan
.52	Pilar
.53	<i>piloon</i>
.54	Landasan
.6	Bangunan atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan orang/trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang air
.7	Bangunan pengaman
.71	Turap/penahan
.72	Bronjong
.73	Strek dam
.74	Kist dam
.75	<i>Courpure</i>
.76	Krib
.8	Bangunan pelengkap
.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
.82	Lampu penerangan
.83	Lampu pengatur lalu lintas
.84	Patok pengaman
.85	Patok ROW (sempadan)
.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	<i>Drainage</i>
.94	Baku
.95	Median
633	-
634	-

635	-
636	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung pengadilan
.2	Rumah pejabat negara
.3	Gedung DPR
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
.1	Taman Kanak-kanak
.2	SD dan Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
.1	Bangunan Olah Raga
.2	Gedung Kesenian
.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
.1	Pusat Perbelanjaan
.2	Gedung Perdagangan
.3	Bank
.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
.2	Gedung Parkir
.3	Rumah Sakit
.4	Gedung Telkom
.5	Terminal Angkutan Udara
.6	Terminal Angkutan Air
.7	Terminal Angkutan Darat
.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
.1	Monumen
.2	Candi
.3	Keraton
.4	Rumah Tradisionil
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
.1	Rumah Perkotaan
.11	Inti/Sederhana
.12	Sedang/Mewah
.2	Rumah Pedesaan
.21	Rumah Contoh
.3	Real Estate
.4	Bapertarum
649	Elemen Bangunan
.1	Pondasi
.11	Di atas tiang
.2	Dinding
.21	Penahan beban
.22	Tidak menahan beban
.3	Atap
.4	Lantait/langit-langit
.41	<i>Suspended</i>

.42	Solit
.5	Pintu/Jendela
.51	Pintu harmonika
.52	Pintu biasa
.53	Pintu sorong
.54	Pintu kayu
.55	Jendela sorong
.56	Jendela vertikal
650	TATA KOTA
651	Daerah Perdagangan /Pelabuhan
.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah Pemerintah
653	Daerah Perumahan (<i>Site & service</i>)
.1	Kepadatan Rendah (<i>Low Density</i>)
.2	Kepadatan Tinggi (<i>High Density</i>)
654	Daerah Industri
.1	Industri Berat
.2	Industri Ringan
.3	Industri Rumah (<i>Home Industri</i>)
655	Daerah Rekreasi (<i>Open Space</i>)
.1	<i>Public Gardens</i>
.2	<i>Sport and Playing Fields</i>
.3	<i>Open Space</i>
656	Transportasi (Tata Letak)
.1	Jaringan jalan
.11	Penerangan jalan
.2	Jaringan kereta api
.3	Jaringan sungai
657	Assaineering
.1	Saluran pengumpulan
.2	Instalasi pengolahan
.21	Bangunan
.211	Bangunan penyaringan
.212	Bangunan penghancur kotoran/sampah
.213	Bangunan pengendap
.214	Bangunan pengering lumpur
.22	Unit disinfektan
.23	Unit perpompaan
658	Kesehatan lingkungan
.1	Persampahan
.11	Bangunan pengumpul
.12	Bangunan pemusnahan
.2	Pengotoran udara
.3	Pengotoran air
.31	Air buangan industri
.4	Kegaduhan
.5	Kebersihan kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
.1	Lingkungan Hidup
.2	Kebersihan lingkungan
.3	Pencemaran
.31	Pencemaran air
.32	Pencemaran udara
661	Daerah hutan

662	Daerah pertanian
663	Daerah pemukiman
664	Pusat pertumbuhan
665	Transportasi
.1	Jaringan jalan
.2	Jaringan kereta api
.3	Jaringan sungai
666	-
667	-
668	-
669	-

670 KETENAGAAN

671	Listrik
.1	Kelistrikan
.11	Kelistrikan PLN
.12	Kelistrikan non PLN
.2	Pembangkit Tenaga Listrik
.21	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
.22	PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
.23	PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
.24	PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
.25	PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
.26	PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
.27	PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
.3	Transmisi Tenaga Listrik
.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
.33	Kabel bawah tanah
.4	Distribusi Tenaga Listrik
.41	Gardu distribusi
.42	Tegangan rendah
.43	Tegangan menengah
.44	Jaringan bawah tanah
.5	Pengusahaan listrik
.51	Sambungan listrik
.52	Penjualan Tenaga Listrik
.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
.1	Bensin / Premium / Pertamina
.2	Minyak Tanah
.3	Solar
674	Tenaga Gas
.1	Biofuel
.2	Minyak Tanah
.3	Biogas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga lainnya

680 PERALATAN

681	-
682	-
683	-
684	-

685 -
686 -
687 -
688 -
689 -

690 AIR MINUM

691 *Intake*
.1 Broncaptering
.2 Sumur
.3 Bendungan
.4 Saringan (*screen*)
.5 Pintu Air
.6 Saluran Pembawa
.7 Alat Ukur
.8 Perpompaan
692 Transmisi Air Baku
.1 Perpipaan
.2 Katup Udara (*air relief*)
.3 Katup Pengurus (*blow off*)
.4 Bak Pelepas Tekanan
.5 Jembatan Pipa
.6 *Syphon*
693 Instalasi Pengelolaan
.1 Bangunan Ukur
.2 Bangunan Aerasi
.3 Bangunan Pengendapan
.4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
.5 Bangunan Pengaduk
.6 Bangunan Saringan
.7 Perpompaan
.8 *Clear Hell*
694 Distribusi
.1 *Reservoir* menara bawah tanah
.11 Menara
.12 *Reservoir* di bawah tanah
.2 Perpipaan
.3 Perpompaan
.4 Jembatan Pipa
.5 *Syphon*
.6 *Hydran*
.61 *Hydran* Umum
.62 *Hydran* Kebakaran
.7 Katup
.71 Katup Udara (*air relief*)
.72 Katup Pelepas (*blow off*)
.8 Bak pelepas tekanan (*pressure reducing valve*)
695 -
696 -
697 -
698 -
699 -

700 PENGAWASAN

700 PENGAWASAN
701 Bidang Urusan Dalam
702 Bidang Peralatan
703 Bidang Kekayaan Daerah

- 704 Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas

710 BIDANG PEMERINTAHAN

- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 728 -
- 729 -

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kajahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Masa
- 749 -

750 BIDANG PEREKONOMIAN

- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan/Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan/Moneter

759 Bidang Agraria

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

761 Bidang Pengairan

762 Bidang Jalan

763 Bidang Jembatan

764 Bidang Bangunan

765 Bidang Tata Kota

766 Bidang Lingkungan

767 Bidang Ketenagaan

768 Bidang Peralatan

769 Bidang Air Minum

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

781 Bidang Pengadaan Pegawai

782 Bidang Mutasi Pegawai

783 Bidang Kependudukan Pegawai

784 Bidang Kesejahteraan Pegawai

785 Bidang Cuti

786 Bidang Penilaian

787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian

788 Bidang Pemberhentian Pegawai

789 Bidang Kependidikan Pegawai

790 BIDANG KEUANGAN

791 Bidang Anggaran

792 Bidang Otorisasi

793 Bidang Verifikasi

794 Bidang Pembukuan

795 Bidang Perbendaharaan

796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan

797 Bidang Pendapatan

798 -

799 Bidang Bendaharaan

800 KEPEGAWAIAN

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi di sini: Kebijakanaksanaan Kepegawaian

.1 Perencanaan

.2 Penelitian

.043 Pengaduan

.05 Tim

.07 Statistik

.08 Peraturan Perundang-Undangan

801 -

802 -

803 -

804 -

- .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan pangkat/pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/pelimpahan/perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 825 Detasering dan penempatan kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi lain
- 829 -

830

KEDUDUKAN

Meliputi: Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, dan Jenjang Pangkat

- 831 Penghitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah/Penyesuaian
- 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -

840

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan Koperasi/ Distribusi, Perumahan, Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi, dan Dispensasi

- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Pangan, Uang Makan
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan dokter
 - .3 Obat-obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang

- .3 Distribusi lainnya
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 849 -

850 CUTI

Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti, Cuti Di Luar Tanggungan Negara, dan Cuti Alasan Lain.

- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Ibadah Haji
- 856 Cuti di Luar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting
- 858 -
- 859 -

860 PENILAIAN

Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi

- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satya Lencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
 - .4 Hadiah Berupa Uang
 - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran / Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan

Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat I
 - .2 Tingkat II
 - .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi: Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Meliputi: Formasi, *Bezetting*, Registrasi, Daftar Riwayat Pekerjaan, Hak, Penggajian, Sumpah Janji, dan Korps Pegawai.

- 871 Formasi
- 872 *Bezetting*
- 873 Registrasi

- .1 NIP
- .2 Karpeg
- .3 Legitimasi/tanda pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian nama
 - .3 Kepartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - 1. SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Kepegawaian
- 879 -

880 PEMBERHENTIAN

Meliputi pemberhentian/pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat

- 881. Permintaan Sendiri
- 882. Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III
 - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non-reguler, pendidikan ke-luar negeri, metode, tenaga pengajar, administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan.

- 891 Perencanaan
 - .1 Progam
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan reguler/Kader
 - .1 IPDN
 - .2 Kursus-kursus reguler
- 893 Pendidikan dan pelatihan / non reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-kursus/Penataran
 - .4 Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat lainnya.
- 894 Pendidikan Keluar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar

- .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposiom
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widya Wisata, KKN
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar
 - .1 Widya Iswara
 - .2 Permintaan Tenaga Pengajar
 - .3 Penambahan Tenaga pengajar
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan meliputi Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya.

900 KEUANGAN

900 KEUANGAN

- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 Dana Alokasi Umum
- 905 Dana Alokasi Khusus
- 906 -
- 907 -
- 908 -

910 ANGGARAN

- 911 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 912 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 913 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- 914 Surat Pencairan Dana (SPD)
- 915 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi
 - .1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - .2 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
- 917 -
- 918 -

920 OTORISASI/SKO

921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-

930 VERIFIKASI

931	SPM Rutin (Daftar P8)
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6.P7)
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan
938	-
939	-

940 AKUNTANSI

941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
943	Rekonsiliasi
944	Realisasi Anggaran
945	Prognosis
946	Neraca

950 PERBENDAHRAAN

951	Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR)
952	Pengelola Keuangan Daerah
953	Pengangkatan / Penggantian Pengguna Anggaran (PA) dan Pengangkatan / Penggantian Bendahara Pengeluaran
954	Pengangkatan/Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Pengangkatan / Penghentian Bendahara Pengeluaran Pembantu
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang
957	-
958	-
959	-

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

961	Pemeriksaan Keuangan
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
966	-

970 PENDAPATAN

971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan Presiden, Menteri, dan Bantuan lainnya
979	Hibah
980	Dana Bagi Hasil
981	Bantuan Keuangan

982 Bantuan Sosial
983 Lain-lain Pendapatan

990

BENDAHARAWAN PEMBELANJAAN

991 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
992 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
993 Surat Perintah Membayar (SPM)
994 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
995 -

KODE PEMBANTU

Kode pembantu di bawah ini tidak bisa dipakai tersendiri, tetapi dapat dipakai sebagai pelengkap dari yang manapun dengan menambahkan di belakangnya tiap kode.

- Contoh : Seminar penerbitan : 481.06
Statistik produksi padi : 521.110.7
Survey kehutanan : 522.021
- 01 PERENCANAAN
 - 02 PENELITIAN
 - 03 PENDIDIKAN
 - 04 LAPORAN
 - 05 TEAM PANITIA
 - 06 SEMINAR
 - 07 STATISTIK
 - 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 09 -
- 01 Perencanaan
 - 02 Penelitian
 - 03 Survey
 - 04 Riset
 - 05 Pendidikan, penataan, kursus, ceramah, simposium, santiaji
 - 04 Laporan
 - 041 Sewaktu-waktu
 - 042 Monografi
 - 043 Pengaduan
 - 05 Panitia, Team, Dewan, Badan
 - 06 Seminar, Workshop, Lokakarya, Raker, Kongres
 - 07 Statistik
 - 071 Sensus, Cacah Jiwa
 - 08 Peraturan Perundang-undangan
 - 09 -

VII. Cara Penggunaan

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dari sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412, 412 bagian dari 410, dan 410 bagian dari 400. Di samping itu, perlu diperhatikan kekuasaan kelas 000.

Contoh:

- 400 Kesejahteraan Rakyat (perincian pertama).
- 410 Pembangunan Desa (perincian kedua).
- 411 -
- 412 Perekonomian Desa (perincian ketiga)
- 412.1 -
- 3.3 Koperasi Desa (perincian keempat)
- 31.31 BUUD (perincian kelima)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang masalah itu disajikan.

Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat, oleh karena itu, untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu, harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah peraturan Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:
 - a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. 188.34 Peraturan Daerah
 - c. 188.3 Peraturan
 - d. 188 Peraturan Perundang-Undangan

Untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf (a) sedangkan makin kecil suatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (b) atau huruf (c) yang lebih sederhana, dan untuk instansi kecil, misalnya Kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (d).

5. Kode Pembantu
Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

591	Tata Guna Tanah
02	Kode pembantu penelitian
591.02	Penelitian Tata Guna Tanah
413.1	Pemukiman kembali penduduk
.06	Kode pembantu seminar
413.106	Seminar pemukiman kembali penduduk

6. Kode Wilayah
Sebagaimana diuraikan pada bab II.7, kode wilayah dipergunakan untuk memperinci lebih lanjut arsip yang jumlahnya sangat besar dan untuk keperluannya penyusunan berkas. Di kantor Pusat Departemen Dalam Negeri Arsip Kepegawaian jumlahnya sangat besar, oleh karena itu, memerlukan perincian dengan kode wilayah, dengan cara menempatkan kode wilayah di belakang angka kode pokok masalah.

Contoh:

121.43	Gubernur Kalimantan Selatan
121	Gubernur Bali

Dengan dipergunakannya kode wilayah, kesulitan menata arsip yang jumlahnya sangat besar itu dapat dipecahkan karena arsip berada pada *file* masing-masing Provinsi.

7. Kode wilayah dimaksud hanya dipakai oleh Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, dan tidak dapat dipakai oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Bagi Daerah Provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk Kabupaten di wilayahnya.

8. Sebelum memutuskan untuk membentuk kode wilayah tersebut, harus dipikirkan apakah hal itu memang benar-benar diperlukan oleh Provinsi. Penyusunan kode wilayah menganut prinsip desimal dan setelah tersusun secara mantap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimuat dalam pola klasifikasi edisi yang akan datang.
9. Penggunaan kode wilayah tidak dapat digabungkan begitu saja pada kode-kode seperti penggunaan kode pembantu, tetapi hanya digunakan pada kode-kode di mana tercantum petunjuk-petunjuk tambahan kode wilayah.
10. Menyusun Kode
Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.
Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu, untuk memperoleh kode yang terinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai dengan 900.
Begitu juga pengawasan 700 yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.
11. Apabila pada kode ada petunjuk tambahan perincian berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu pada kode pola yang lain.

Contoh I :

055 Proyek Bidang Perekonomian
511.2 Pasar
055.112 Proyek Pembangunan Pasar

Contoh II :

056 Proyek Bidang Pekerjaan Umum
630 Jembatan
056.3 Protek Jembatan (angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan).

12. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan dua kode yang berlainan itu sama-sama benar.
Contoh :
 - a. Peraturan Pemerintah Tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan perundang-undangan (08).
 - b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.

13. Tunjuk Silang
Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang.

Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dengan dua arah. Surat tentang "persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (persawahan) dengan tunjuk silang : 475 (transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah yang memang sangat penting.

14. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menyelusuri kode-kode disusun indeks kaitan. Indeks kaitan adalah himpunan nama-nama masalah yang disusun sesuai pola klasifikasi dan urutan abjad dengan ketentuan posisi kode indeks kaitan di belakang masalah sedangkan pola klasifikasi di depan masalah.

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR